

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina Setiawan, 2022, Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa), CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta
- Amin Suprihartini, 2018 Pemerintahan Desa dan Kelurahan, PT Cempaka Putih, Bandung.
- Asori, *et,al*, 2021 Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Indocamp, Tangerang Selatan.
- Bahder Johan Nasution, 2008 Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Effendy Khasan, 2010 Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2011 Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.
- _____ 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara Press: Malang.
- _____ 2004, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. A. W Widjaja, 2003, Otonomi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nata Irawan, 2017, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Mansyur Achmad, 2018, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Regulatif dan Aplikatif, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021 Tata Kelola Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, Cetakan Pertama Juni.

- Rian Nugroho, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sri Palupi, et.al, 2016, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU, Jakarta.
- Sinambela, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidah, 2016, Badan Pemusyawaratan Desa, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2016.
- _____ 2012, Kelembagaan RT, RW, LPM PKK, Karang Taruna, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Rudy, 2022, Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa, Aura CV Anugrah Utama Raharja, Lampung, Cetakan Maret.
- Wasistino Sadu dan M Irwan Tahir, 2006 Prospek Pengembangan Desa, Fokus Media, Bandung.

B. Jurnal

- Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, 2019, Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2.
- Kusnida Indrajaya dan Nurul Hikmah, 2020, Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Pada Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No.1 Februari.
- Khaeriah, 2021, Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.
- Nugroho, S, 2013, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No.2, hal.258-259. Desember.

- Priyo Hutomo, 2021, Perspektif Teori Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Volume 1 Nomor 1 Maret.
- Roza, Darmini dan Arliman S, Laurensius, 2017, Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 Nomor 3.
- Saputra Prayozza, 2014, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa”. *Jurnal Hukum Kelembagaan Negara*.
- Siti Istiqomah, 2015, Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 1.
- Shafikh, Maiza, 2019, Analisis Open Government dan e- Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 Oktober 2018 – Maret .
- Sofian Malik, 2020, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober.

C. Karya ilmiah

- Doni Damara, 2016, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Faisal, 2021, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019” Studi kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Khaeriah, 2021, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.

- Nurnia Syafitri, 2020, Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Ratih Widiyanti, 2011, Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Supriadi Jaya Abadi, 2018, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Sinjai”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ulfa Nursekhah, 2018, Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016, Tesis, Universitas Islam Indonesia,.

D. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____ Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN. 1999/NO.60, TLN NO.3839, LL SETNEG : 44 HLM)
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM)
- _____ Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LN . 2014/ No. 7, TLN NO. 5495, LL SETNEG : 65 HLM)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (LN. 2014 No. 113, TLN NO. 5539, LL SETNEG : 71 HLM)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- _____ Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 7)
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 82)

E. INTERNET

Pengertian Kedudukan dan Posisi

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedudukan-posisi> diakses pada tanggal 16 November 2022 Pukul 12: 45 WIB

Pengertian Kedudukan: <https://kamushukum.web.id/search/kedudukan> diakses pada tanggal pada tanggal 16 November 2022 Pukul 12:50 WIB.

Desa Ladang Panjang Sarolangun :

<https://ms.m.wikipedia.org/wiki/ladang-panjang-sarolangun> diakses pada tanggal 16 November Pukul 12:55 WIB.